

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan sebuah Negara terbentuk adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dijelaskan dalam pasal 1 bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Selanjutnya, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹

Kesejahteraan masyarakat berbanding lurus dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah dapat dilihat dari tingkat pendapatan masyarakatnya. Dalam hal ini berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian yang dilakukan masyarakatnya. Dalam lingkup masyarakat pesisir kegiatan perekonomiannya tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya laut. Kebanyakan dari masyarakat yang hidup di daerah pesisir pantai mata

¹ Dikutip dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012

pencahariannya sebagai nelayan yang menggantungkan hidupnya dari sektor perikanan.

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumberdaya laut yang besar di Indonesia. Menurut data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu memiliki panjang pantai 114 km dengan kewenangan 4 mil laut (MSY/mean sustainable yield : 49.395 ton), memiliki 3 gugusan pulau-pulau kecil (Pulau Biawak, Pulau Gosong dan Pulau Candikian), Menurut LAPAN (2006) Areal yang sesuai untuk Tambak 39.911,60 Ha (Produk Potensial 142.819 ton), Areal untuk Budidaya Air Tawar / Kolam 25.000 Ha (Produk potensial 125.000 ton), Areal untuk Mina Padi 16.000 Ha (Produk potensial 52.000 ton), Perairan Umum 1.966 Ha (Produk potensial 6.000 ton), dan Areal untuk budidaya laut 752,57 Ha di Pulau Biawak, P. Gosong dan Pulau Candikian (Produk Potensial 13.116 ton). Potensi pertumbuhan ekonomi sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Indramayu berada pada 12 kecamatan wilayah pesisir, yang didukung oleh kegiatan pelelangan ikan di TPI/PPI sebanyak 14 TPI/PPI, dengan jumlah serapan tenaga kerja kegiatan perikanan dan kelautan tahun 2011 sebanyak 86.895 orang yang terdiri dari 38.553 orang nelayan laut dan juragan, 4.760 orang pencari ikan di perairan umum, 18.632 orang pembudidaya ikan di tambak, 10.407 orang pembudidaya ikan di kolam, 10 orang pembudidaya di laut, 5.869 orang pengolah produk perikanan, dan 1.205 orang bakul/pedagang ikan serta 7.459 orang penggarap garam rakyat.²

² Dikutip dari data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu tahun 2011

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu tahun 2010 sebanyak 11.707 nelayan tersebar di wilayah Kec. Juntinyuat yang terdiri dari 861 pemilik perahu dan 10.846 sebagai buruh atau nelayan kecil.³ Dari jumlah tersebut jika di bandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Indramayu, Kec. Juntinyuat merupakan wilayah dengan jumlah nelayan kecil terbesar di Indramayu. Hal tersebut didukung dengan wilayah yang dekat pantai yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakatnya khususnya di desa dadap yang merupakan salah satu desa di kecamatan juntinyuat yang wilayahnya sebagian besar merupakan kawasan pesisisir dengan mayoritas penduduknya sebagian nelayan.

Tabel 1.1. Banyaknya Nelayan Menurut Status Nelayan di Kabupaten Indramayu Tahun 2010⁴

KECAMATAN	STATUS NELAYAN		JUMLAH
	Pemilik (RTP)	Buruh (RTBP)	Pemilik (RTP)
HAURGEULIS	0	0	0
GANTAR	0	0	0
KROYA	0	0	0
GABUSWETAN	0	0	0
CIKEDUNG	0	0	0
TERISI	0	0	0
LELEA	0	0	0
BANGODUA	0	0	0
TUKDANA	0	0	0
SUKAGUM	0	0	0
KERTASEMAYA	0	0	0
WIDASARI	0	0	0
KERTASEMAYA	0	0	0
SUKAGUMIWANG	0	0	0
KRANGKENG	0	0	0

³Dikutip dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, "*Juntinyuat dalam Angka 2011*".

⁴Dikutip dari data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu

KARANGAMPEL	72	722	794
KEDOKANBUNDER	0	0	0
JUNTINYUAT	861	10.846	11.707
SLIYEG	0	0	0
JATIBARANG	0	0	0
BALONGAN	122	706	828
INDRAMAYU	0.043	6.687	7.73
SINDANG	166	962	1.128
CANTIGI	420	1.542	1.926
PASEKAN	210	845	1.057
LOHBENER	0	0	0
ARAHAN	0	0	0
LOSARANG	204	965	1.169
KANDANGHAUR	1.394	8.521	9.915
SUKRA	0	0	0
ANJATAN	0	0	0
BONGAS	113	501	614
PATROL	121	495	616
TAHUN 2010	4.726	32.792	37.484
TAHUN 2008	4.834	32.538	37.372
TAHUN 2009	4.283	31.124	35.047

Melihat potensi yang cukup besar dari sektor perikanan di Kabupaten Indramayu akhirnya pada Tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Indramayu membangun sarana infrastruktur berupa pelabuhan perikanan Dr. Ir. Soearno Dipl HE yang didirikan di desa Dadap Kec. Juntinyuat yang diharapkan mampu menjadi sarana dalam mengembangkan potensi perikanan di Kabupaten Indramayu di tingkat Jawa Barat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indramayu khususnya masyarakat nelayan yang tinggal di desa Dadap yang mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai nelayan. Namun dalam perkembangannya pelabuhan tersebut mengalami kemunduran yang signifikan. Bahkan dapat dikatakan *mati suri* sehingga pencapaian kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar pelabuhan tersebut jauh dari harapan. Menurut data BPS Kabupaten Indramayu Tahun 2011 jumlah keluarga pra sejahtera di Desa Dadap

mencapai 24,3 % dari 4861 keluarga yang ada atau sekitar 18,5 % dari total keluarga prasejahtera yang ada di kecamatan Juntinyuat. Jika dibandingkan dengan desa lain yang ada di Kec. Juntinyuat, desa dadap memiliki tingkat kesejahteraan yang masih rendah.⁵

Dari hasil pra observasi yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 2013, mayoritas penduduk di Desa Dadap bekerja sebagai nelayan yang tingkat kesejahteraannya masih rendah. Hal tersebut dihadapkan pada kondisi masyarakat nelayan yang mayoritas adalah nelayan perahu kecil yang kurang diberdayakan, keberadaan KUD yang tidak berjalan, serta kurangnya peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dan mediator bagi masyarakat nelayan dalam mengembangkan potensi perikanan di daerah tersebut.

Menurut Fachrurrozi selaku tim asistensi TPI-Dadap, menjelaskan bahwa :

Kondisi pantai yang mengalami pendangkalan yang cukup parah dikarenakan sudah cukup lama tidak dilakukan pengerukan. Hal tersebut menghambat aktivitas melaut sehingga perahu besar sulit untuk merapat ke dermaga, akibatnya kegiatan pelelangan di TPI tersebut kian sepi. Selain itu, tidak berjalannya KUD Ngupaya Mina menjadikan para nelayan beralih ke tengkulak untuk memperoleh pinjaman modal dan mereka diharuskan menjual hasil tangkapan mereka ke tengkulak dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga yang mereka peroleh jika dilelang di TPI. Keberadaan sarana dan prasarana di pelabuhan perikanan tersebut juga kurang mendapat perawatan dari pihak pemerintah daerah sehingga kondisinya rusak. Padahal tempat tersebut selain sebagai pelabuhan bisa dijadikan sebagai objek wisata yang mendatangkan sumber pendapatan daerah yang selayaknya mampu memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya terutama para nelayan.⁶

⁵ Dikutip dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, *Juntinyuat dalam Angka 2012*.

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Fachrurrozi, tanggal 5 Januari 2013.

Dengan demikian peran Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan dalam memfasilitasi akses informasi teknologi, modal dan pemasaran hasil tangkapan ikan bagi para nelayan, didaerah tersebut. Hal tersebut yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul: *Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan (Studi kasus di Desa Dadap Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran tingkat kesejahteraan nelayan di Desa Dadap?
2. Apa peran pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan masyarakat nelayan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan keluarganya?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui gambaran tingkat kesejahteraan nelayan di Desa Dadap
2. Mengetahui peran pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
3. Mengetahui upaya yang dilakukan masyarakat nelayan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan keluarganya.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait :

1. Manfaat bagi lembaga, diantaranya :
 - a. Dapat memperkenalkan potensi perikanan dan pola perekonomian masyarakat Nelayan di Desa Dadap Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.
 - b. Memberikan wawasan mengenai peran Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Dadap Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.
2. Manfaat bagi akademik, diantaranya :
 - a. Sebagai bahan referensi dalam pembelajaran khususnya dalam hal perekonomian berbasis kerakyatan.
 - b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Manfaat bagi peneliti, diantaranya :
 - a. Peneliti dapat mengetahui tentang peran Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
 - b. Peneliti dapat mengetahui potensi alam yang dimiliki Kabupaten Indramayu yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya..

E. Penelitian Terdahulu

Setelah melalui penelusuran beberapa skripsi yang memiliki keterkaitan judul dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dari penelusuran tersebut penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu diantaranya :

Dalam skripsi Maharani Adi Cahyadi yang berjudul *Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam Optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bagi Peningkatan Kesejahteraan Nelayan (Studi di Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan)* yang ditulis pada tahun 2006, menyatakan bahwa peranan pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dan melindungi kegiatan para nelayan diwujudkan melalui kebijakan Pemerintah Daerah Lamongan yang termuat dalam Keputusan Bupati nomor 04 tahun 2003 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 50 tahun 2000 tentang retribusi pasar grosir penyelenggaraan pelelangan ikan. Isi dari Keputusan tersebut adalah untuk kesejahteraan nelayan, untuk menyelenggarakan keputusan tersebut tersedia sumber daya manusia serta sarana dan pra sarana yang cukup. Dalam keputusan Bupati tersebut juga menjelaskan besarnya tarif retribusi mulai dari pungutan sampai pada penggunaannya. Dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa peranan pemerintah daerah melalui kebijakan yang termuat dalam Keputusan Bupati nomor 04 tahun 2003 sebenarnya sudah dilaksanakan, tetapi kebijakan tersebut dianggap masih kurang efektif.

Dalam skripsi Sony Abner Damamain yang berjudul *Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Melalui Program Pemberdayaan Rumput Laut (Studi Kasus Budi Daya Rumput Laut di Desa Sathean)* yang ditulis pada tahun 2012, menyatakan bahwa peranan Pemerintah daerah dalam program pemberdayaan budidaya rumput laut yang digulirkan oleh Pemerintah daerah lewat dinas Kelautan dan Perikanan tersebut dapat dikatakan belum efisien karena masih

terdapat kendala-kendala di lapangan seperti masalah stabilisasi harga, masalah hama, masalah tempat penampungan pasca panen serta masalah pemberian bantuan perahu. Program pemberdayaan rumput laut ini dapat berjalan dengan baik dari input dan outputnya maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan peraturan daerah terkait dengan penentuan harga rumput laut sehingga para petani tidak dirugikan oleh para pembeli maupun industri –industri terkait, peningkatan SDM melalui pelatihan-pelatihan bagi para petani terkait dengan teknis budidaya rumput laut, harus ada kontrol dan evaluasi dari dinas Kelautan dan Perikanan, sehingga program tersebut bisa berjalan lebih maksimal, serta harus ada penambahan paket bantuan bagi kelompok budidaya yang sudah dibentuk.

Dalam skripsi Hj. Eva Fajriyah yang berjudul *Tanggapan Nelayan Terhadap Upaya Kantor Cabang Dinas Perikanan dan Kelautan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Nelayan (Studi tentang peningkatan kesejahteraan keluarga nelayan di Desa Dadap Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu)* yang ditulis pada tahun 2006, menyatakan bahwa program-program yang diberikan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Hal tersebut dikarenakan program-program yang diberikan hanya bersifat pelatihan saja tanpa adanya tindak lanjut.

Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut, terdapat keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Karena dalam skripsi tersebut meneliti tentang bagaimana peran Pemerintah Daerah terkait usaha peningkatan kesejahteraan

nelayan sebagai kelompok masyarakat pesisir yang umumnya merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah.

F. Kerangka Pemikiran

Desentralisasi kewenangan pemerintah yang diberikan pusat pada daerah dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, penumbuhan aspirasi dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengertian otonomi daerah dimaknai sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.⁷

Dalam kaitannya mengenai peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentu tidak terlepas dari wewenang pemerintah dalam hal pembuatan kebijakan.⁸ Pemerintah mempunyai peran dalam perekonomian berkaitan dengan penyediaan barang-barang publik yang sangat dibutuhkan masyarakat. Seperti pertahanan dan keamanan, jalan raya, pelabuhan, pendidikan dan kesehatan. Untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana tersebut, pemerintah mendapatkan dana dari masyarakat berupa pajak.

Dengan demikian Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat melaksanakan sistem pemerintahan yang meletakkan peranan pemerintah daerah pada posisi yang sangat krusial dalam meningkatkan kesejahteraan warganya.

⁷ Hari Sabarno, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah: Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 42

⁸ Suparmoko, *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 15

Peranan pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah disamping dana perimbangan yang diperoleh dari hasil eksploitasi sumberdaya alam akan sangat menentukan kekuatan dari APBD.⁹

Secara tradisi, kebijakan sosial mencakup ketetapan atau regulasi pemerintah mengenai lima bidang pelayanan sosial, yaitu jaminan sosial, pelayanan perumahan, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan atau perawatan sosial personal. Kelima bidang tersebut biasanya diorganisir oleh lembaga pemerintah atau departemen, seperti departemen kesejahteraan sosial, departemen pendidikan, departemen kesehatan atau oleh badan-badan khusus yang dibentuk berdasarkan undang-undang.¹⁰

Kebijakan sosial sangat erat kaitannya dengan konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara kesejahteraan biasa diartikan baik sebagai sebuah teori atau pendekatan, maupun sebagai sebuah sistem mengenai bagaimana kebijakan sosial diaplikasikan. Para ahli seringkali menyebutkan bahwa kebijakan sosial pada dasarnya merupakan studi mengenai Negara kesejahteraan dan sistem pelayanan sosial. Dibanyak negara yang menganut sistem negara kesejahteraan, kebijakan sosial diwujudkan kedalam berbagai program pemerintah melalui skema-skema perlindungan sosial (*sosial protection*) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (*sosial safety nets*).¹¹

⁹ Suparmoko, *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 17

¹⁰ Edi Suharto, (Bandung : Alfabeta, 2008), hlm. 14-15

¹¹ *Ibid.*, hlm. 56

Dalam konteks pembangunan nasional, maka pembangunan kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai segenap kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan *civil society* untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan manusia melalui pendekatan pekerja sosial, yang pertama dan utama adalah penanggulangan kemiskinan dalam bentuk manifestasinya. (Jones dalam Suharto, 2006a).

Abu Yusuf, faqih abad ke-2, dalam bukunya, *kitab Al-Kharaj*, menganjurkan khalifah Harun Al-Rasyid:

Perhatikanlah apa yang telah diamanatkan Allah padamu dan tugas kekuasaan yang diamanatkan kepadamu.

Abu Yusuf juga menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan dan proyek rakyat demi kesejahteraan umum. Ketika menasehati Harun, ia mengatakan:

Penguasa bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat dan harus melakukan segala sesuatu karena ia menganjurkan kebaikan bagi mereka.

Dalam karyanya ini Abu Yusuf selalu menekankan pentingnya kebijakan seperti itu sehingga dapat menjamin kesejahteraan rakyat, dan sebagai sandarannya ia mengutip pernyataan khalifah Umar yang ditujukan ke salah seorang gubernurnya, Abu Musa al-Asyari :

Sebaik-baik manusia yang berkuasa adalah mereka yang memerintah demi kemakmuran rakyatnya dan seburuk-buruk penguasa adalah mereka yang memerintah rakyatnya malah menemui kesulitan.

Dari pernyataan diatas jelaslah bahwa, menurut para pemikir Islam, sumber-sumber kekuasaan negara dianggap sebagai amanat dan harus dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hakikat kesejahteraan

dalam negara Islam bukan hanya memiliki tujuan ekonomi, tapi juga menjadi tujuan *syar'i* bagi negara Islam. Dalam hal ini, para fuqaha berpendapat bahwa terpenuhinya kebutuhan rakyat adalah kewajiban sosial (*fardh kifayah*). Dengan demikian, tujuan negara adalah menjalankan persyaratan berupa terpenuhinya kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kewajiban sosial umumnya berkaitan dengan kepentingan rakyat. Mengabaikan kewajiban itu berarti telah menzalimi mereka.¹²

Ciri umum yang dapat dilihat dari kondisi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi dalam kehidupan masyarakat nelayan adalah fakta-fakta yang bersifat fisik berupa kualitas pemukiman. Kampung-kampung nelayan miskin akan mudah diidentifikasi dari kondisi rumah hunian mereka. Rumah-rumah yang sangat sederhana, berdinding anyaman bambu, berlantai tanah berpasir, beratap daun rumbia, dan keterbatasan pemilikan perabotan rumah tangga adalah tempat tinggal para nelayan buruh atau nelayan tradisional. Sebaliknya, rumah-rumah yang megah dengan segenap fasilitas yang memadai akan mudah dikenali sebagai tempat tinggal pemilik perahu, pedagang perantara atau pedagang berskala besar dan pemilik toko.¹³

¹² Sabahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam: Keuangan Publik, Konsep Perpajakan, dan Peran Bait al-Mal*, (Bandung: Nuansa, 2005), hlm. 60

¹³ Abdul Mugni, *Strategi Rumah tangga Nelayan Dalam Mengatasi Kemiskinan*, 2006, hlm. 17

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini terdiri atas :

Dalam bab 1, menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

Dalam bab 2, menjelaskan mengenai teori yang berhubungan dengan pemerintah daerah, teori tentang kesejahteraan, serta teori tentang masyarakat nelayan. Teori – teori tersebut kemudian dijadikan sebagai landasan teori bagi penulis dalam melakukan penelitian.

Dalam bab 3, menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan, terkait dengan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data yang digunakan, serta uji keabsahan data.

Dalam bab 4, menjelaskan mengenai kondisi objektif tempat penelitian, serta pembahasan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini.

Dalam bab 5, merupakan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan disertai dengan saran-saran yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Dadap Kec. Juntinyuat.